



Indonesia
For Global Justice

www.igj.or.id

KITA MEMBUTUHKAN KONVENSI KERANGKA KERJA PBB TENTANG HUTANG NEGARA



MENGAPA KITA MEMERLUKAN KONVENSI KERJA PBB?

- Lebih dari tiga miliar orang tinggal di negara-negara yang menghabiskan lebih banyak uang untuk pembayaran bunga daripada untuk pendidikan atau kesehatan.
- Pada tahun 2024, rata-rata pembayaran utang luar negeri dan dalam negeri mencapai 41% dari pendapatan anggaran negara-negara berkembang. Beban utang negara yang sangat besar terus menjadi hambatan utama bagi tindakan ekonomi dan iklim yang mendesak.
- Forum dan mekanisme yang ada telah menangani masalah ini sesuai dengan perspektif dan kepentingan pemberi pinjaman. Inisiatif keringanan utang sangat tidak memadai, dan utang yang tidak berkelanjutan dan tidak sah terus membebani negara-negara di belahan bumi selatan.
- Kerangka kerja dan mekanisme penyelesaian utang yang adil, setara, dan transparan sangat dibutuhkan untuk mendorong reformasi untuk peminjaman dan peminjaman yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan – reformasi yang mengutamakan kepentingan kolektif semua orang dan negara.

MENEGASKAN PBB

PBB perlu menggunakan kekuatan mandat globalnya dan proses multilateralnya untuk membangun kerangka kerja dan mekanisme penyelesaian utang global yang adil, setara, dan transparan. Kami mendesak Negara Anggota untuk menyetujui perlunya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Utang Negara (selanjutnya disebut Konvensi Utang). Perjanjian semacam itu dapat membuka proses antarpemerintah menuju reformasi arsitektur pembangunan yang diperlukan untuk mencegah akumulasi utang yang tidak berkelanjutan dan tidak sah serta memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Arsitektur keuangan internasional yang direformasi akan melayani kepentingan negara-negara berkembang dan komunitas global yang lebih luas dengan membuka jalan bagi solusi utang yang berkelanjutan dan tahan lama.

Berikut ini menjadi dasar untuk perjanjian tersebut:

Untuk *“elaborate and adopt through a process of intergovernmental negotiations,....., a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes”* (UN General Assembly Resolution 68/304. September 2024)

Untuk *“Emply international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,....”* Particularly through ECOSOC (UN Charter)

Untuk *“...address the challenges of financing for development around the world, particularly in developing countries”* and to consider creating *“a mechanism for the resolution of sovereign debt crisis”* (Monterrey Consensus Financing for Development, 2012).

Untuk mencegah praktik utang yang tidak kooperatif dan tidak adil dengan mempromosikan *“Principles on Promoting Responsible Sovereign Lending and Borrowing* (UNCTAD 2012)

APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONVENSI UTANG

- Meliputi konsensus global yang berkembang mengenai aturan, prinsip, dan struktur yang diperlukan di seluruh siklus utang untuk mencegah dan mengelola krisis utang serta menawarkan solusi yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.
- Untuk mendirikan Mekanisme Resolusi Utang Negara Multilateral yang permanen yang berpusat pada rakyat dan berbasis aturan, mengikuti standar keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat menuju penyelesaian krisis utang yang tertib, demokratis, dan berkelanjutan dalam suatu proses yang melibatkan semua pemberi pinjaman, baik publik maupun swasta.



APA YANG MASYARAKAT SIPIL BAYANGKAN DALAM KONVENSI KERANGKA KERJA PBB TENTANG UTANG NEGARA

- Prinsip-prinsip peminjaman dan peminjaman negara yang bertanggung jawab
- Kerangka kerja keberlanjutan utang yang selaras dengan perjanjian hak asasi manusia inti, kesetaraan gender, iklim, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan
- Ketentuan untuk pembentukan:

Mekanisme penyelesaian utang negara multilateral yang adil dan transparan yang menawarkan jalur dari restrukturisasi pembatalan, untuk memungkinkan negara-negara peminjam mencapai SDG, memastikan kesetaraan gender, dan memenuhi kewajiban hak asasi manusia.

Mekanisme pembatalan layanan utang otomatis yang melindungi negara-negara Global Selatan dari guncangan sosial-ekonomi, lingkungan, geopolitik; dan klausul kontrak utang yang mengatur pembagian risiko antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Registri utang global yang mengikat untuk mempromosikan transparansi

INFORMASI KONTAK

INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE

 igj@igj.or.id

 www.igj.or.id